

RABU KLIWON, 25 FEBRUARI 2015
(6 JUMADILAWAL 1948)

Meredam Arogansi Australia

FLUKTUASI hubungan bertetangga antara Republik Indonesia dengan Australia agaknya memang ditakdirkan cukup sering terjadi dengan beragam sebabnya. Setelah beberapa tahun belakangan hubungan bilateral dua negara berlangsung positif (aman dan produktif), kini hubungan tersebut kembali gontai. Semua akibat respons *over acting* Pemerintah Australia di bawah Perdana Menteri (PM) Tony Abbott atas rencana eksekusi mati Myuran Sukamaran dan Andrew Chan. Keduanya adalah warga negara Australia yang divonis hukuman mati pengadilan Indonesia karena terbukti terlibat penyelundupan narkoba dalam kasus Bali Nine.

Respons *over acting* pemerintahan koalisi Partai Liberal-Nasional itu tercermin lewat diplomasi agresifnya dalam dua bulan terakhir untuk menekan Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar mau membatalkan eksekusi mati terhadap duo Bali Nine tersebut. Setelah tekanannya melalui diplomasi standar (lobi-lobi lewat kedutaan besar, kementerian luar negeri, maupun kepala pemerintahan) tidak mampu mengubah keputusan Pemerintah Indonesia untuk mengeksekusi duo Bali Nine tadi. Pemerintahan Abbott tampak sengaja menstimulus warganya untuk turut serta mengecam keputusan Indonesia mengeksekusi mati dua warga negara Kanguru tersebut. Melalui sosial media (sosmed), mereka selain mengecam juga mengancam akan memboikot wisata Indonesia dan Bali khususnya. Di luar itu, pemerintahan Abbott meminta bantuan Sekjen PBB Ban Ki-moon untuk ikut menekan Jakarta agar tidak melanjutkan eksekusi mati terhadap para narapidana kasus apapun termasuk narkoba.

Sungguh keterlaluan, dalam peristiwa (kasus) bilateral menyangkut kejahatan narkoba, PM Abbott membawa-bawa orang nomor wahid di lembaga PBB. Ironisnya, hal itu untuk mengintervensi kedaulatan hukum dalam negeri Indonesia demi pembebasan dua warga negaranya yang akan dieksekusi mati lantaran kejahatan narkoba itu. Padahal vonis mati terhadap dua warga negara Australia tersebut nyata-nyata tidak melanggar hukum internasional, meski hal itu dikaitkan dengan In-

Chusnan Maghribi

ternational Covenant on Civil Political Rights (ICCPR) yang mengandung pesan untuk menghapus hukuman mati sekalipun.

Karena semua upayanya itu tidak sanggup meluluhkan ketegasan pemerintah Indonesia untuk mengeksekusi mati duo Bali Nine, PM Abbott kemudian mengungkit bantuan kemanusiaan yang pernah diberikan Canberra kepada Aceh saat dihantam gelombang tsunami akhir Desember 2004. Pengungkitan ini tentu menunjukkan arogansi Abbott (Australia) sekaligus menyinggung harga diri masyarakat Aceh maupun Indonesia umumnya.

Maka, sangatlah wajar dan manusiawi jika publik Aceh maupun Indonesia kemudian merespons arogansi tersebut dengan menggelar Gerakan Koin untuk Australia guna meredam arogansi Australia itu. Masyarakat Indonesia ingin bantuan kemanusiaan dari Negeri Kanguru satu dasawarsa lalu mestinya diberikan atas dasar ketulusan (keikhlasan) seratus persen, bukan karena pamrih.

Pertanyaannya, begitu berartikah Myuran Sukamaran dan Andrew Chan bagi negara-bangsa Australia hingga bersikap arogan (terhadap Indonesia) untuk membelanya?

Bagi warga masyarakat Australia, duo Bali Nine itu agaknya dipandang hanya memiliki arti sebatas sebagai manusia biasa saja. Jadi, motif partisipasinya dalam upaya pembebasannya dari eksekusi mati tak lebih dari motif kemanusiaan belaka.

Namun, bagi pemerintahan Abbott, di balik upayanya yang mati-matian tadi tampak terselip motif politik berupa keinginannya untuk mengatrol kembali popularitasnya di dalam negeri yang akhir-akhir ini menurun tajam. Ini akibat beberapa kebijakan domestiknya yang tidak populer semisal pemangkasan

anggaran untuk perguruan tinggi negeri dan gaji dokter pemerintah. Karenanya, Abbott mendapat mosi tidak percaya di dalam partainya sendiri. Beruntung dalam sidang internal Partai Liberal 9 Februari lalu Abbott lolos dari mosi tidak percaya dengan perbandingan suara 39 menolak dan 61 mendukungnya untuk melanjutkan menduduki kursi PM.

Dalam pandangan Abbott, apabila pemerintahannya sukses menyelamatkan dua warga negaranya yang terancam eksekusi mati oleh Pemerintah Indonesia, besar kemungkinan popularitasnya di dalam negeri bisa didongkrak kembali. Ini akan menjadi bekal sangat berharga untuk menghadapi pemilihan umum mendatang.

Sebab itulah, Presiden Jokowi mestinya tak perlu ciut nyali menghadapi diplomasi agresif dan arogan pemerintahan Abbott. Jokowi mesti konsisten atas sikap tegasnya dengan tidak menganulir eksekusi mati terhadap duo Bali Nine tadi. □ - g

*) *Chusnan Maghribi, alumnus Hubungan Internasional FISIP Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).*

Pojok KR

Hujan angin di DIY, renggut korban jiwa.
-- Jangan ada korban lagi.

Indonesia siap kembalikan bantuan Australia.
-- Tak ada makan siang gratis.

Sultan HB X 'curhat' dengan Komisi XI.
-- Curhat atau 'sabda pandhita ratu'...

Berabe